

## PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas - Pelaihari Telp (0511) 21155

### KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 💇 TAHUN 2024

#### **TENTANG**

# PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2024

### KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANAH LAUT,

#### Menimbang

:

:

- a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pengelolaan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut 2024, maka perlu dilakukan penunjukan dan penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024;

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 1. Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) seagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuanga Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahaan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6
  Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
  Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
  Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan
  Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 5);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

**KESATU** 

Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024, dengan daftar pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**KEDUA** 

Tugas dan tanggung jawab Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagai berikut :

- 1. Menyusun rencana, melaksanakan kegiatan, mengawasi/monitoring dan evaluasi.
- 2. Membuat laporan kegiatan setiap bulan berdasarkan kemajuan pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangan.
- 3. Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangan dan melaporkan hasil kegiatan kepada kepala badan.

KETIGA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 Nomor DPA: DPA/A.1/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024.

**KEEMPAT** 

Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 02 Januari 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANAH LAUT,

MOHAMMAD SYAHID

#### Tembusan:

- 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- 2. Inspektur Kabupaten Tanah Laut.
- 3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. TANAH LAUT

NOMOR :09 Tahun 2024 TANGGAL :02 Januari 2024

# DAFTAR PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN ( PPTK ) PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2024

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM KEGIATAN	KET
3	2	3	4
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			
Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di	Kemasyarakatan dan Ekonomi ( Analis Kebijakan Muda/ Sub Koordinator	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	
Dacian		Anggota	
		Anggota	
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			
Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah A	Kabid Ketahanan Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	
	Analis Kebijakan Muda/ Sub Koordinator	Anggota	
	Analis Kerjasama Kebudayaan	Anggota	
2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kabid Ketahanan Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	4
	Analis Kebijakan Muda/ Sub Koordinator	Anggota	
	Analis Kerjasama Kebudayaan	Anggota	
	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan  Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan  1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah  Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya  Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya  1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah  2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan  Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan  1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah  Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya  Regiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya  1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah  2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah  3. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah  3. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah  Analis Kebijakan Muda/ Sub Koordinator Analis Kebijakan Muda/ Sub Koordinator Analis Kebijakan Muda/ Sub Koordinator	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan  Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan  1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Bralussi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah  Kabid Ketahanan Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi, PPTK)  Analis Kebijakan Muda/ Sub Koordinator  Analis Kebijakan Muda/ Sub Koordinator

)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM KEGIATAN	KET
	3	2	3	4
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial			
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			
	1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan		Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	
Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Analis Kebijakan Muda/ Sub Koordinator	Anggota		
		Analis Kebijakan Muda/ Sub Koordinator	Anggota	
		Analis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Anggota	
		Pengolah Data	Anggota	
	2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Plt. Kabid Kewaspadaan Nasional	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	
		Analis Kebijakan Muda/ Sub Koordinator	Anggota	
		Analis Kebijakan Muda/ Sub Koordinator	Anggota	
		Analis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Anggota	
		Pengolah Data	Anggota	
	3. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga	Plt. Kabid Kewaspadaan Nasional	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	
Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Analis Kebijakan Muda/ Sub Koordinator	Anggota		
		Analis Kebijakan Muda/ Sub Koordinator	Anggota	
		Analis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Anggota	
		Pengolah Data	Anggota	
	4. Penyusunan Program Kerja di Bidang Rewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Plt. Kabid Kewaspadaan Nasional	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	•
		Analis Kebijakan Muda/ Sub Koordinator	Anggota	
		Analis Kebijakan Muda/ Sub Koordinator	Anggota	
		Analis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Anggota	
		Pengolah Data	Anggota	

0	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM KEGIATAN	KET
1	3	2	3	4
5. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Plt. Kabid Kewaspadaan Nasional	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
		Analis Kebijakan Muda/ Sub Koordinator	Anggota	
A	Analis Kebijakan Muda/ Sub Koordinator	Anggota		
	Analis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Anggota		
	Pengolah Data	Anggota		
4	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah	Kabid Bina Ideologi & Waswasan Kebangsaan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	3
	Kebangsaan	Analis Wawasan Kebangsaan	Anggota	
		Pengadministrasi Umum	Anggota	
	2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah	Kabid Bina Ideologi & Waswasan Kebangsaan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	
Kebangsaan	Analis Wawasan Kebangsaan	Anggota		
		Pengadministrasi Umum	Anggota	
	3. Pembentukan Paskibraka	Kabid Bina Ideologi & Waswasan Kebangsaan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	
		Analis Wawasan Kebangsaan	Anggota	
		Pengadministrasi Umum	Anggota	
	4. Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Kabid Bina Ideologi & Waswasan Kebangsaan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	
		Analis Wawasan Kebangsaan	Anggota	
		Pengadministrasi Umum	Anggota	
_				

.

0	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM KEGIATAN	KET
l	3	2	3	4
5	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	8		
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi an, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan		
	1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai	Kabid Politik	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	
	Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Analis Kebijakan Ahli Muda	Anggota	
		Analis Partai Politik	Anggota	
	2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Analis Pembelajaran Pembinaan Pendidikan Masyarakat	Anggota	
		Pengadministrasi Umum	Anggota	
	Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi	Kabid Politik	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	
		Analis Kebijakan Ahli Muda	Anggota	
		Analis Partai Politik	Anggota	
		Analis Pembelajaran Pembinaan Pendidikan Masyarakat	Anggota	
		Pengadministrasi Umum	Anggota	
	3. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,	Kabid Politik	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	
	Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Analis Kebijakan Ahli Muda	Anggota	
		Analis Partai Politik	Anggota	
	<u>M</u>	Analis Pembelajaran Pembinaan Pendidikan Masyarakat	Anggota	
		Pengadministrasi Umum	Anggota	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
7	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kasubbag Umum & Kepegawaian	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	

.

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM KEGIATAN	KET
3	2	3	4
1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Analis Tata Laksana	Anggota	
2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Anggota	
	Pengadministrasi Umum	Anggota	
	Pengadministrasi Umum	Anggota	
	Pengemudi	Anggota	
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kasubbag Umum & Kepegawaian	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	
1. Pengadaan Mebel	Analis Tata Laksana	Anggota	
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Anggota	
	Pengadministrasi Umum	Anggota	
	Pengadministrasi Umum	Anggota	
	Pengemudi	Anggota	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kasubbag Umum & Kepegawaian	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	
1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Analis Tata Laksana	Anggota	
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Anggota	
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pengadministrasi Umum	Anggota	
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pengadministrasi Umum	Anggota	
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pengemudi	Anggota	
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD .	**************************************		,
8. Penyediaan Bahan/Material			
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kasubbag Umum & Kepegawaian	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM KEGIATAN	KET
1	3	2	3	4
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Analis Tata Laksana	Anggota	
	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Anggota	
		Pengadministrasi Umum	Anggota	
		Pengadministrasi Umum	Anggota	
		Pengemudi	Anggota	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kasubbag Umum & Kepegawaian	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Analis Tata Laksana	Anggota	
	2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Anggota	
	3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadministrasi Umum	Anggota	
		Pengadministrasi Umum	Anggota	
		Pengemudi	Anggota	
7	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pit. Kasubbag Perencanaan & Keuangan	Pejabat Pelaksana Teknis Keglatan (PPTK)	
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bendahara	Anggota	
	2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota	
		Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Anggota	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Plt. Kasubbag Perencanaan & Keuangan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	

O	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM KEGIATAN	KET
1	3	2	3	4
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bendahara	Anggota	
	2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota	
		Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Anggota	

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANAH LAUT,

MOHAMMAD SYAHID

BADAN KESATUAN S DAN POLITI